



BUPATI PASURUAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN  
NOMOR 52 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA DINAS PERTANIAN  
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Pasuruan Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Republik Indonesia Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Nomor 183 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 244 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor : 114 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor : 187 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1990);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
17. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 204);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 290) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 329);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 318);
21. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 Nomor 39).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Dinas Pertanian yang selanjutnya disingkat Renja Dinas Pertanian adalah dokumen perencanaan Badan Kepegawaian dan Pelatihan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Pertanian yang selanjutnya disingkat RKA Dinas Pertanian adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Dinas Pertanian serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

Pasal 2

Renja Dinas Pertanian Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan Dinas Pertanian Kabupaten Pasuruan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 3

Renja Dinas Pertanian Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 berpedoman pada Renstra Dinas Pertanian, hasil evaluasi Renja Dinas Pertanian tahun lalu dan hasil evaluasi Renja Dinas Pertanian tahun berjalan.

#### Pasal 4

- (1) Renja Dinas Pertanian Tahun 2022 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :
- BAB I : PENDAHULUAN;
  - BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU;
  - BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH;
  - BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH;
  - BAB V : PENUTUP.
- (2) Renja Dinas Pertanian Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 5

Renja Dinas Pertanian Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Dinas Pertanian.

#### Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 2 Agustus 2021  
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal 2 Agustus 2021  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

ANANG SAIFUL WIJAYA  
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 NOMOR 52



Lampiran : PERATURAN BUPATI PASURUAN  
NOMOR : 52 TAHUN 2021  
TANGGAL : 2 - 8 - 2021

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Sektor pertanian dan perkebunan memegang peranan penting dalam pembangunan daerah dan nasional. Selain itu yang juga penting untuk dicermati adalah peran sektor pertanian dan perkebunan .

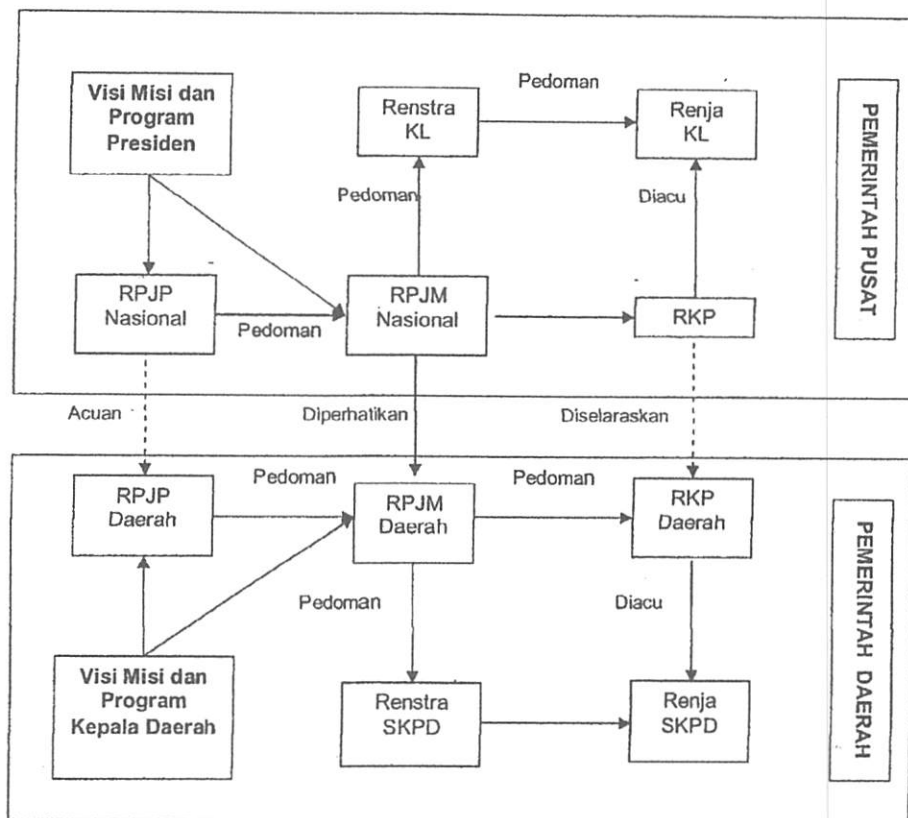
alam menjaga dan memelihara fungsi lingkungan hidup (multifungsi lahan pertanian). Usaha untuk melaksanakan pembangunan pertanian dan perkebunan tersebut dilaksanakan bersama oleh petani, pelaku usaha dan pemerintah sebagai fasilitator yang mengarah kepada berkembangnya usaha pertanian dan perkebunan yang efisien dan memberi manfaat sepenuhnya bagi petani.

Di dalam melaksanakan proses pembangunan di bidang pertanian dan perkebunan, Dinas Pertanian perlu membuat suatu rencana kerja agar dalam pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan visi, misi maupun sasaran strategis yang telah dirumuskan. Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Pasuruan memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang langsung dilaksanakan oleh instansi intern maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat petani melalui kelompok-kelompok tani yang telah terbentuk.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pertanian merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja. Penyusunan Rencana kerja mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja Dinas Pertanian dapat dikerjakan secara paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi Dinas Pertanian, evaluasi pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra yang telah ditetapkan pada awal periode pembangunan lima tahunan.



Gambar 1. Keterkaitan Renja OPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



## 1.2. Landasan Hukum

Di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pertanian wajib untuk merencanakan sekaligus menganggarkan program dan kegiatan sesuai dengan tupoksi yang telah ditetapkan. Adapun dasar hukum dari perencanaan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Landasan Idiil : Pancasila
- b. Landasan Konstitusional : Undang-Undang Dasar tahun 1945
- c. Landasan Operasional :
  1. Undang-Undang No. 11 Tahun 1974 tentang pengairan
  2. Undang-Undang No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman
  3. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
  4. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
  5. Undang – Undang nomor 18 tahun 2004 tentang Perkebunan;
  6. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
  7. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 8 Tahun 2005 ;
  8. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
  9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJP Nasional Tahun 2005 – 2025
  10. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri No. 13 Tahun 2006 ;



12. Undang-Undang no. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP No. 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
14. Keputusan Menteri Pertanian No. 74/Kpts/TP.500/2/98 tentang Jenis Komoditi Tanaman Binaan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Direktorat Jenderal Perkebunan
15. Keputusan Menteri Pertanian No. 511/Kpts/PD.310/9/2006 tentang Jenis Komoditi Tanaman Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pasuruan 2005-2025;
17. Peraturan Daerah No. 12 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah tahun 2009 – 2029
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan No. 16 Tahun 2016 tentang Organisasi dan tata kerja Dinas Daerah
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan No. 1 tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Pasuruan tahun 2019-2023
20. Keputusan Bupati no. 63 tahun 2016 tentang kedudukan dan fungsi organisasi dan tata laksana Dinas Pertanian.
21. Peraturan Bupati Pasuruan No. 17 tahun 2019 tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud Penyusunan Renja adalah sebagai berikut :

1. Menjamin Keterkaitan antara komponen Renstra SKPD dan komponen RPJMD Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
2. Menjamin komitmen terhadap kesepakatan program yang sudah dibahas secara partisipatif antar semua komponen, mulai dari saat penyusunan, penuangan ke dalam Dokumen hingga penjabarannya ke dalam Pelaksanaan program dan kegiatan.
3. Mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan merumuskannya menjadi prioritas pembangunan.
4. Sebagai bahan penyusun RKA-SKPD yang diimplementasikan dalam program/kegiatan selama satu tahun.
5. Memberikan arah sekaligus tolok ukur keberhasilan pembangunan pertanian di Kabupaten Pasuruan tahun 2022

Adapun tujuan penyusunan Renja adalah sebagai berikut:

1. Memberikan gambaran konsistensi program dan sinkronisasi pencapaian sasaran strategis
2. Memberikan kepastian dan sinergitas perencanaan program kegiatan pembangunan pertanian





3. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas dalam perencanaan pemanfaatan sumber daya pertanian.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

##### **BAB I. PENDAHULUAN**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Dinas Pertanian Kabupaten Pasuruan agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

###### **1.1. Latar Belakang**

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Dinas Pertanian, proses penyusunan Renja, keterkaitan antara Renja dengan dokumen RKPD, Renstra, dengan Renja provinsi/Kabupaten, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

###### **1.2. Landasan Hukum**

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

###### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD.

###### **1.4. Sistematika Penulisan**

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

##### **BAB II. HASIL DAN EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun 2020 dan perkiraan capaian tahun berjalan (2021), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu, dan realisasi Renstra SKPD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan SKPD dan/atau realisasi APBD untuk SKPD yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;



4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

### BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan, indikator tujuan, sasaran dan indikator sasaran yang ingin dicapai berdasarkan rumusan dalam Renstra yang telah ditetapkan sekaligus memuat program dan kegiatan.

### BAB IV. RENCANA KERJA DAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini memuat rencana kinerja yang diimplementasikan dalam bentuk program/kegiatan, indikator kinerja outcome/output beserta kerangka pendanaan.

### BAB V. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, antara lain Catatan penting yang perlu mendapat perhatian; Kaidah-kaidah pelaksanaan ; Rencana tindak lanjut.



## BAB II

### HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

#### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Pengukuran capaian kinerja tahun 2020 dapat dilihat pada data yang meliputi capaian peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan serta peningkatan kelompok tani agribisnis. Hasil pengukuran kinerja masing-masing sasaran akan diuraikan dalam pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.a. Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian %
1.	Meningkatnya produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	% Peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	0,4%	2,096%	524%
		❖% Peningkatan produksi tanaman pangan	0,4%	8,09%	2.022,50
		❖% Peningkatan produksi tanaman buah tahunan	0,4%	0,48%	120
		❖% Peningkatan produksi tanaman sayur	0,4%	0,56%	140



		❖% Peningkatan produksi tanaman hias	0,4%	0,36%	90
		❖% Peningkatan produksi tanaman perkebunan	0,4%	0,99%	247,50
2	Meningkatnya usaha pertanian dan perkebunan yang terstandarisasi	Jumlah produk hasil pertanian/agribisnis yang terstandarisasi	5	4	80
		Persentase produk hasil pertanian/agribisnis yang terstandarisasi	36%	28,57%	79,36

Selain itu Pengukuran kinerja Dinas Pertanian Tahun 2020 menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap tujuan dan sasaran Dinas Pertanian Tahun 2020 disajikan sebagai berikut :

**Tujuan** : Meningkatkan produktivitas sektor pertanian dan perkebunan dengan mendorong perkembangan ekonomi kreatif



Tabel 3.2. Perbandingan Realisasi Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi		
			2018	2019	2020
Meningkatnya produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	% Peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	0,4%	25,93%	4,16%	2,096 %
	❖ % Peningkatan produksi tanaman pangan	0,4%	8,3%	17,59 %	8,09%
	❖ % Peningkatan produksi tanaman buah tahunan	0,4%	43,12%	0,62%	0,48%
	❖ % Peningkatan produksi tanaman sayur	0,4%	61,04%	1,16%	0,56%
	❖ % Peningkatan produksi tanaman hias	0,4%	12,18%	0,60%	0,36%
	❖ % Peningkatan produksi tanaman perkebunan	0,4%	5%	0,82%	0,99%
Meningkatnya usaha pertanian dan perkebunan yang terstandarisasi	Persentase produk hasil pertanian/agribisnis yang terstandarisasi	3	3	4	4
	Persentase produk hasil pertanian/agribisnis yang terstandarisasi	36%	-	-	28,57 %



Tabel 2.c. Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode Renstra

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target Akhir Renstra</b>	<b>Realisasi Th 2020</b>
Meningkatnya produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	% Peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan		
	❖ % Peningkatan produksi tanaman pangan	0,7%	8,09%
	❖ % Peningkatan produksi tanaman buah tahunan	0,7%	0,48%
	❖ % Peningkatan produksi tanaman sayur	0,7%	0,56%
	❖ % Peningkatan produksi tanaman hias	0,7%	0,36%
	❖ % Peningkatan produksi tanaman perkebunan	0,7%	0,99%
Meningkatnya usaha pertanian dan perkebunan yang terstandarisasi	Jumlah produk hasil pertanian/agribisnis yang terstandarisasi	8 macam	4 macam
	Persentase produk hasil pertanian/agribisnis yang terstandarisasi	57,14%	28,57%



## **A. ANALISIS CAPAIAN KINERJA**

### **Sasaran I : “Meningkatnya produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan “**

Sasaran tersebut diatas mempunyai indikator kinerja Persentase Peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan. Untuk memudahkan perhitungan produksi maka indikator kinerja tersebut di detailkan menjadi peningkatan produksi tanaman pangan, peningkatan produksi tanaman buah, peningkatan produksi tanaman sayur, peningkatan produksi tanaman hias dan peningkatan produksi tanaman perkebunan. Adapun analisis capaian kinerja pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

#### **1) % Peningkatan Produksi Tanaman Pangan**

Tanaman pangan yang menjadi prioritas Dinas Pertanian adalah tanaman padi dan jagung. Kedua komoditas ini merupakan bahan pangan utama yang dikonsumsi kebanyakan orang Indonesia sehingga ketersediaannya sedemikian penting dan harus ditingkatkan produksinya. Selain kedua komoditas diatas, tanaman kedelai juga merupakan tanaman pangan prioritas nasional. Namun demikian minat petani untuk menanam tanaman kedelai semakin berkurang karena produksi kedelai yang rendah dan harga yang kurang menjanjikan.

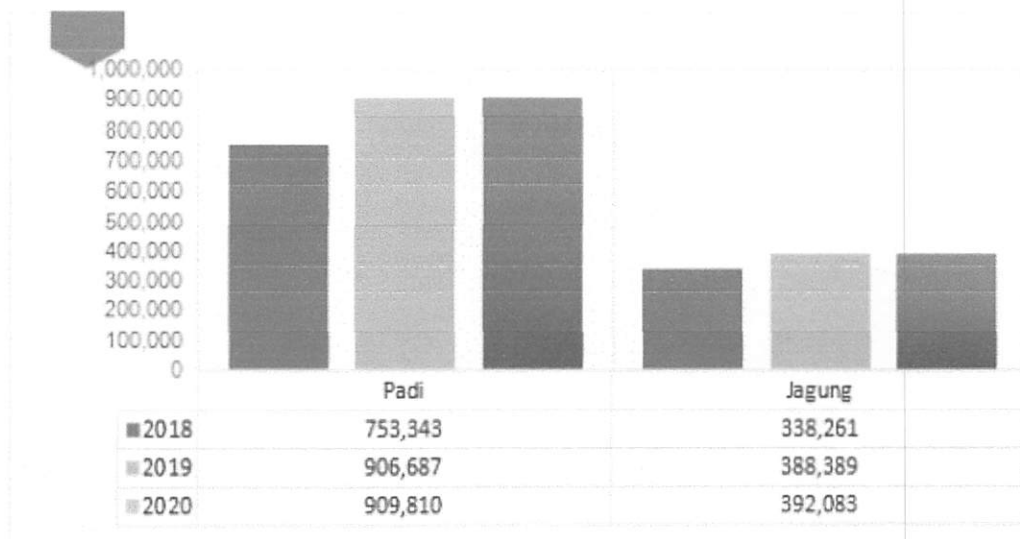
Persentase peningkatan produksi tanaman pangan tahun 2020 adalah sebesar 8,09% capaian ini telah melampaui dari target sebesar 0,4% yang telah ditetapkan pada RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 - 2023 atau sebesar 2.022,50%.

Produksi padi pada tahun 2020 sebesar 909.810 ton meningkat dibandingkan tahun 2019 dengan produksi sebesar 906.687 ton, Produksi jagung pada tahun 2020 sebesar 392.083 ton meningkat dibandingkan tahun 2019 dengan produksi sebesar 388.389 ton. Peningkatan tersebut dikarenakan adanya peningkatan Luas panen pada kedua komoditas tersebut. Adanya bantuan benih, bantuan pupuk,



bantuan alat mesin pertanian, Sekolah Lapang pengendalian Hama Terpadu, pembangunan jaringan irigasi tersier dan sumur bor merupakan alasan kenaikan produksi tanaman pangan.

Gambar 2. Produksi Tanaman Padi dan Jagung Tahun 2018 – 2020



## 2) % Peningkatan produksi tanaman sayur

Kabupaten Pasuruan kaya akan bermacam-macam jenis sayuran. Tetapi saat ini yang menjadi prioritas adalah tanaman kentang dan Paprika. Kedua komoditas ini mempunyai prospek yang bagus untuk dikembangkan di Kabupaten Pasuruan. Pada tahun 2020 peningkatan produksinya ditargetkan sebesar 0,4% terrealisasi sebesar 0,56%. Capaian ini telah jauh melampaui dari target sebesar 0,4% yang telah ditetapkan pada RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 - 2023 atau sebesar 140%.

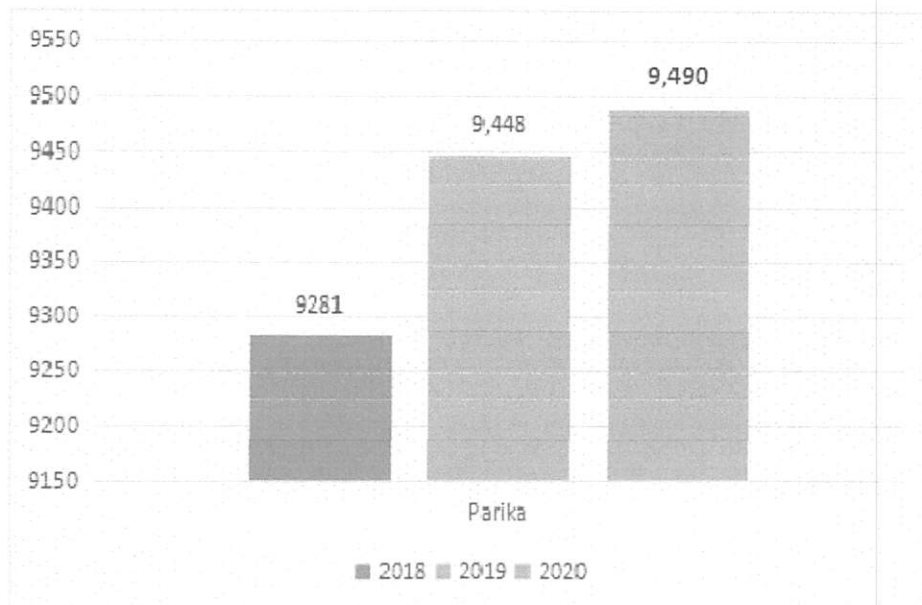
Produksi Kentang pada tahun 2020 sebesar 230.332 ton meningkat dibandingkan tahun 2019 dengan produksi sebesar 228.757 ton (0,69%) dan Produksi Paprika pada tahun 2020 sebesar 9.490 ton meningkat





dibandingkan tahun 2019 dengan produksi sebesar 9.448 ton (0,43%). Peningkatan produksi utamanya didukung oleh peningkatan Luas panen pada kedua komoditas tanaman sayuran. Peningkatan luas panen disebabkan bantuan benih unggul bersertifikat pada tanaman kentang serta penggunaan sistem irigasi tetes (Drip Irrigation) pada tanaman Paprika dan Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu yang bersumber dari APBD Kabupaten.

Gambar 3. Produksi Tanaman Paprika Tahun 2018 – 2020





### 3). % Peningkatan produksi tanaman buah

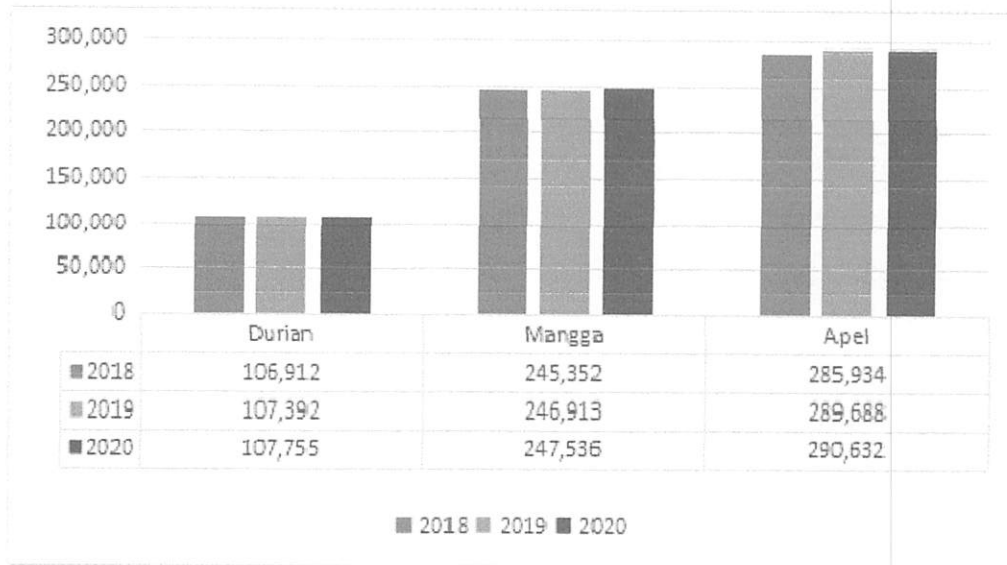
Komoditas unggulan jenis buah yang dikembangkan dan cocok dengan klimatologi kabupaten Pasuruan adalah mangga, apel dan durian. Ketiga komoditas ini menjadi primadona di pasaran buah-buah lokal karena masing-masing mempunyai ciri khas yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Untuk komoditas mangga yang menjadi unggulan adalah mangga gadung klon 21 atau biasa disebut mangga putar. Sedangkan buah durian yang ada di 8 kecamatan sentra masing-masing punya cita rasa yang tidak dimiliki di daerah lain. Adapun buah apel mempunyai lahan pengembangan yang cukup luas sekaligus mempunyai kualitas yang tidak kalah dengan sentra apel lain di Indonesia.

Persentase peningkatan produksi tanaman buah tahunan tahun 2020 adalah sebesar 0,48%, capaian ini telah melampaui dari target sebesar 0,4% yang telah ditetapkan pada RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 - 2023 atau sebesar 120%.

Produksi Apel pada tahun 2020 sebesar 290.632 ton meningkat dibandingkan tahun 2019 dengan produksi sebesar 289.688 ton (0,33%), Produksi Durian pada tahun 2020 sebesar 107.332 ton meningkat dibandingkan tahun 2019 dengan produksi sebesar 107.303 ton (0,50%), dan Produksi Mangga pada tahun 2020 sebesar 247.536 ton meningkat dibandingkan tahun 2019 dengan produksi sebesar 246.010 ton (0,62%). Peningkatan tersebut dikarenakan adanya peningkatan Luas panen dan produktivitas pada ketiga komoditas tersebut. Keberhasilan pembuahan diluar musim (Off session) pada tanaman mangga, bantuan bibit mangga dan durian yang bersumber dari APBD kabupaten, bantuan pupuk organik pada tanaman apel serta kestabilan harga durian yang membuat petani durian termotivasi membudidayakan tanaman durian secara intensif merupakan alasan kenaikan produksi tanaman buah tahunan.



Gambar 4. Produksi Tanaman Mangga, Apel, Durian Tahun 2018 – 2020



#### 4). % Peningkatan produksi tanaman hias

Komoditas andalan untuk tanaman hias di Kabupaten Pasuruan adalah Bunga krisan dan Bunga sedap malam. Pengembangan bunga krisan ada di kecamatan Tukur sedangkan pengembangan bunga sedap malam ada di kecamatan Rembang dan Bangil.

Persentase peningkatan produksi tanaman hias tahun 2020 adalah sebesar 0,36%, Secara umum produksi bunga krisan dan bunga sedap malam meningkat namun capaian ini belum mencapai target yang telah ditetapkan pada RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 - 2023 yaitu sebesar 0,4% atau capaian kinerjanya sebesar 90%.

Produksi Bunga Krisan pada tahun 2020 sebesar 94.382.476 tangkai meningkat dibandingkan tahun 2019 dengan produksi sebesar 93.752.963 tangkai (0,67%) dan Produksi Bunga Sedap Malam pada tahun 2020 sebesar 90.129.769 tangkai meningkat dibandingkan tahun 2019 dengan produksi sebesar 90.091.503 tangkai (0,04%). Adanya pandemi covid 19 menyebabkan pembatasan kegiatan yang ada di masyarakat sehingga permintaan pasar terhadap tanaman hias juga menurun. Penurunan permintaan pasar inilah yang mengakibatkan



minat petani untuk menanam tanaman hias juga menurun sehingga secara otomatis produksi tanaman hias juga belum memenuhi target yang telah ditetapkan.

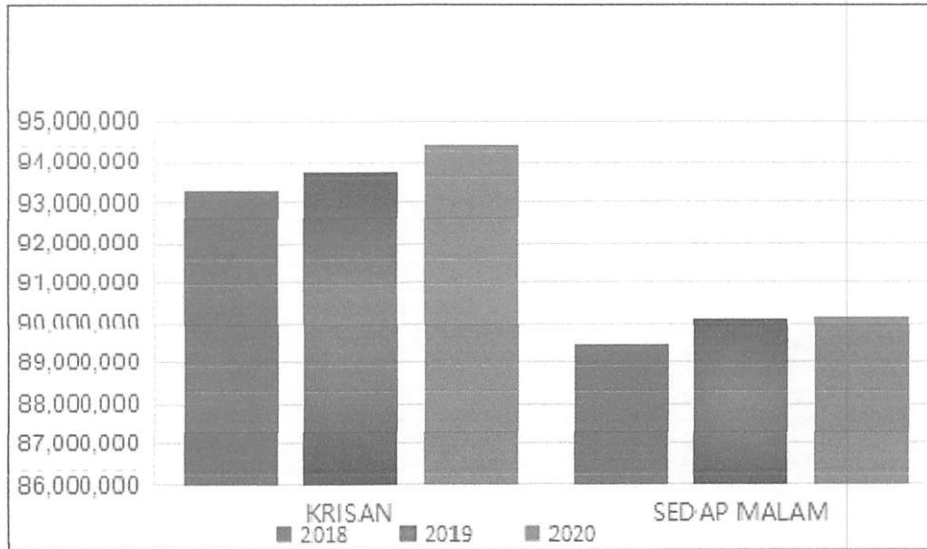
Komoditas andalan untuk tanaman hias di Kabupaten Pasuruan adalah Bunga krisan dan Bunga sedap malam. Pengembangan bunga krisan ada di kecamatan Tukur sedangkan pengembangan bunga sedap malam ada di kecamatan Rembang dan Bangil.

Persentase peningkatan produksi tanaman hias tahun 2020 adalah sebesar 0,36%, Secara umum produksi bunga krisan dan bunga sedap malam meningkat namun capaian ini belum mencapai target yang telah ditetapkan pada RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 - 2023 yaitu sebesar 0,4% atau capaian kinerjanya sebesar 90%.

Produksi Bunga Krisan pada tahun 2020 sebesar 94.382.476 tangkai meningkat dibandingkan tahun 2019 dengan produksi sebesar 93.752.963 tangkai (0,67%) dan Produksi Bunga Sedap Malam pada tahun 2020 sebesar 90.129.769 tangkai meningkat dibandingkan tahun 2019 dengan produksi sebesar 90.091.503 tangkai (0,04%). Adanya pandemi covid 19 menyebabkan pembatasan kegiatan yang ada di masyarakat sehingga permintaan pasar terhadap tanaman hias juga menurun. Penurunan permintaan pasar inilah yang mengakibatkan minat petani untuk menanam tanaman hias juga menurun sehingga secara otomatis produksi tanaman hias juga belum memenuhi target yang telah ditetapkan.



Gambar 5. Produksi Tanaman Hias Tahun 2018 – 2020



#### 5). % Peningkatan produksi Tanaman Perkebunan

Komoditas perkebunan masih berpeluang cukup besar untuk dikembangkan di Kabupaten Pasuruan, terutama komoditas kopi, cengkeh, tebu dan kelapa. Iklim yang sesuai dan ketersediaan lahan perkebunan adalah hal utama yang mendukung pengembangan komoditas ini.

Persentase peningkatan produksi tanaman perkebunan tahun 2020 dibanding tahun 2019 adalah sebesar 0,99%, capaian ini telah melampaui dari target sebesar 0,4% yang telah ditetapkan pada RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 - 2023 atau sebesar 247,50%.

Produksi Kopi pada tahun 2020 sebesar 1.380,34 ton meningkat dibandingkan tahun 2019 dengan produksi sebesar 1.365,43 ton, Produksi Cengkeh pada tahun 2020 sebesar 372,73 ton meningkat dibandingkan tahun 2019 dengan produksi sebesar 367,65 ton. Produksi Tebu pada tahun 2020 sama dengan produksi pada tahun 2019 yaitu sebesar 24.299,93 ton. Produksi Kelapa pada tahun 2020 sebesar 2.657,62 ton meningkat dibandingkan tahun 2019 dengan produksi sebesar 2.643,76 ton. Peningkatan tersebut disebabkan adanya

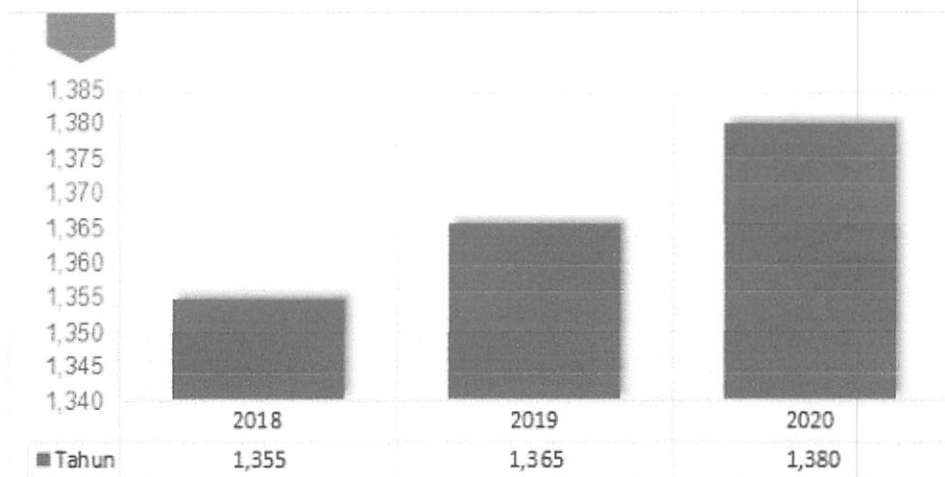


peningkatan Luas panen pada keempat komoditas unggulan sebagai output dari bantuan bibit secara kontinyu, kegiatan peremajaan tanaman kelapa secara kontinyu yang bersumber dari anggaran APBD Kabupaten Pasuruan, sekolah lapang pengendalian hama terpadu serta bimtek cara budidaya tanaman perkebunan, sarana prasarana pendukung budidaya dan penanganan pasca panen kopi yang dilakukan secara intensif serta peningkatan SDM petani melalui pembinaan dan pelatihan kepada kelompok tani.

Pada tahun 2020 Pemerintah Kabupaten telah memfasilitasi petani hingga memperoleh Kapiten Pasuruan Getas Juara (Kopi Asli Kabupaten Pasuruan Penggerak Ekonomi Petani Kopi Pasuruan Menuju Citra Rasa Internasional) sebagai Top 30 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KOVABLIK). Pada tahun 2020 juga memperoleh penghargaan dari AVPA ( Agency For The Valorization of the Agricultural Product) yang berkedudukan di Paris yaitu

Geme Concours International «Cafes Torrefies a l'origine» AVPA - PARIS 2020 mendapatkan medali emas.

Gambar 6. Produksi Kopi  
Tahun 2018 – 2020



**Sasaran II : “Meningkatnya usaha pertanian dan perkebunan yang terstandarisasi “**

Sasaran tersebut diatas mempunyai indikator kinerja sebagai berikut :  
Persentase produk hasil pertanian/agribisnis yang terstandarisasi

Tabel 3.8. Perbandingan Realisasi Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi		
		2018	2019	2020
Meningkatnya usaha pertanian dan perkebunan yang terstandarisasi	Persentase produk hasil pertanian/agribisnis yang terstandarisasi	n/a	28,57	28,57

**ANALISIS CAPAIAN KINERJA**

Produk pertanian baik dalam bentuk segar maupun olahan perlu distandarisasikan sebagai jaminan atas mutu produk yang dihasilkan. Berdasarkan target RPJMD Kabupaten Pasuruan tahun 2019-2023 produk pertanian/agribisnis yang terstandarisasi adalah sebesar 36%. Capaian dari indikator ini adalah sebesar 80% dengan telah terstandarisasinya komoditas Padi, kopi, buah dan sayur dari lembaga sertifikasi organik seloliman (LeSOS).

Lembaga ini bertanggung jawab untuk mensertifikasi bahwa produk yang dijual sebagai “organik” adalah diproduksi dan ditangani menurut Standar Nasional Indonesia Sistem Pertanian Organik dan telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional.



Sertifikasi organik ini merupakan sarana untuk memberikan jaminan bahwa produk organik memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam standar melalui kegiatan survey dan inspeksi di lapangan.

### **ANALISIS PENGGUNAAN SUMBER DAYA ANGGARAN**

Pada dasarnya pembagian alokasi anggaran pada suatu OPD disesuaikan dengan prioritas pembangunan. Pada tabel di bawah ini disajikan alokasi anggaran untuk masing-masing sasaran:

Tabel 3.11. Persentase Alokasi Anggaran

<b>No</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>	<b>Anggaran (%)</b>
1.	Meningkatnya produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	% Peningkatan Produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	15,686,417,756	85%
2.	Meningkatnya usaha pertanian dan perkebunan yang terstandarisasi	Persentase produk hasil pertanian/agribisnis yang terstandarisasi	580,458,219	3,16%

Untuk mencapai target indikator kinerja mutlak diperlukan dukungan dana sebagai input pelaksanaan kegiatan pendukung pencapaian indikator kinerja. Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa sasaran pertama didukung anggaran sebesar Rp. 15,686,417,756,- terealisasi sebesar Rp. 10.874.636.231,- (69%). Sedangkan sasaran kedua sebesar Rp. 580,458,219,- terealisasi sebesar Rp. 432.089.250,- (74%). Prioritas anggaran adalah pada sasaran strategis yang pertama sebesar 85% dan pada sasaran strategis yang kedua adalah 3,16%.





Persentase alokasi anggaran ini mempertimbangkan bahwa pada sasaran strategis pertama merupakan proses on farm yang memerlukan dana besar seperti pembangunan infrastruktur terutama jalan pertanian, Jaringan irigasi dan alat mesin pertanian, bantuan saprodi serta bimtek bagi kelompok tani. Sedangkan sasaran kedua lebih bersifat proses off farm yang merupakan penunjang dalam aplikasi system agribisnis di kelompok tani dan sertifikasi untuk mutu produk pertanian.

### PERBANDINGAN PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN

Di dalam melaksanakan pembangunan pada Dinas Pertanian didukung oleh program dan kegiatan yang melekat pada APBD Kabupaten berupa anggaran belanja langsung tahun 2020 sebesar Rp. 18.358.821.477,- Realisasi anggaran belanja langsung tahun 2020 pada Dinas Pertanian sebesar 13.039.161.209,- atau 71,02%.

Tabel 3.12. Perbandingan Pencapaian kinerja dan anggaran per program/kegiatan

No	Program / Kegiatan	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	<b>Program : PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>				
	Kegiatan :						
	➤ Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	12	12	100	465.000.000	386.913.331	83,21
	➤ Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10	1	10	34.912.500	28.683.000	82,16
	➤ Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	10	10	100	53.000.000	38.500.000	72,64
	➤ Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	4	4	100	20.350.500	25.853.000	88,08
	➤ Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	60.000	60.000	100	38.792.500	34.412.500	88,71



No	Program / Kegiatan	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
	➤ Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	712	712	100	21.570.280	21.262.000	98,57
	➤ Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	180	180	100	170.343.640	170.182.000	99,91
	➤ Kegiatan Penyediaan Jasa Perkantoran	26	25	96,15	879.815.000	668.871.000	76,02
	➤ Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	16	16	100	64.777.000	61.220.500	94,51
<b>2</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>100%</b>	<b>53%</b>		<b>334.384.082</b>	<b>296.538.397</b>	
	➤ Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor	1	1	100	100.000.000	97.922.000	97,92
	➤ Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional	1	-	0	-	-	-
	➤ Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	3	2	66,67	12.257.582	3.600.000	29,37
	➤ Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	1	-	0	-	-	-
	➤ Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	7	7	100	222.126.500	195.016.397	87,80
<b>3</b>	<b>Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku</b>	<b>25%</b>			<b>267.970.000</b>	<b>90.148.500</b>	
	➤ Kegiatan Penerapan Inovasi Teknis	165	0	0	-	-	-
	➤ Kegiatan Penumbuhan dan Penguatan Kelembagaan	30	-	0	169.895.000	3.708.500	2,32
	➤ Kegiatan Penanganan Panen dan Pasca Panen	2	2	100	108.075.000	86.440.000	79,98



<b>4</b>	<b>Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian dan Perkebunan</b>	6 %			147.672.092	78.802.000	
	➤ Kegiatan Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis	40	0	0	39.794.210	-	-
	➤ Kegiatan Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani	2	2	100	88.392.884	65.185.000	73,74
	➤ Kegiatan Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian	75	0	0	19.485.000	13.617.000	69,88
	➤ Kegiatan Promosi atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggul Daerah	20	20	100	432.786.125	353.287.250	81,63
<b>5</b>	<b>Program Produksi Tanaman Perkebunan</b>	<b>0,4%</b>	<b>0</b>		<b>472.301.400</b>	<b>131.928.300</b>	
	➤ Kegiatan Penyuluhan Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan (SLPHT Tanaman Perkebunan Tahunan)	2	2	100	22.876.000	22.876.000	100
	➤ Kegiatan Sekolah Lapang Agensi Hayati (SLAH) Tanaman Perkebunan	2.	-	0	37.336.500	-	-
	➤ Kegiatan Pengembangan Tanaman Perkebunan	13.000	-	0	412.088.900	109.052.300	26,46
<b>6</b>	<b>Program Produksi Tanaman Pangan dan Holtikultura</b>	<b>0,4%</b>	<b>0</b>		<b>1.291.702.206</b>	<b>1.086.499.486</b>	
	➤ Kegiatan Pengembangan Perbenihan/Perbibitan	600	600	100	170.000.000	168.459.800	99,09
	➤ Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Perkebunan, Produk Pertanian	4	-	0	84.062.922	72.634.852	86,41
	➤ Kegiatan Pengembangan Tanaman Sayuran	2	-	0	11.999.034	11.999.034	100



	Organik						
	➤ Pengembangan Agribis Hortikultura	14.000	-	0	156.347.000	149.411.000	95,56
	➤ Pelatihan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Modern Bercocok Tanam	6	2	33,33	85.296.500	59.296.500	69,52
	➤ Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Pertanian	75.000	75.000	100	530.000.000	519.160.300	97,95
	➤ Pengelolaan Kebun Bibit Dinas Hortikultura	2	2	100	109.750.000	105.538.000	96,16
	➤ Sekolah Lapang Tanaman Pangan dan Horti	4	-	0	144.246.750	0	0
<b>6</b>	<b>Program Sarana dan Prasarana Hasil Pertanian</b>	<b>1,16%</b>	<b>0</b>		<b>13.654.444.150</b>	<b>9.566.059.945</b>	
	➤ Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Sarpras Pertanian	1 Dokumen	1 Dokumen	100	25.052.150	21.654.500	86,44
	➤ Kegiatan Pengelolaan Lahan dan Air	2	2	100	163.895.500	82.461.400	50,31
	➤ Kegiatan Sekolah Lapang Iklim	2	-	0	4.680.000	2.340.000	50,00
	➤ Kegiatan Optimalisasi Alat Mesin Pertanian	40	-	0	391.287.000	6.643.500	1,70
	➤ Pembangunan/Rehabilitasi Irigasi Air Tanah	12	-	0	3.649.622.500	764.599.000	20,95
	➤ Kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi Tersier	2,400	2,250	93,75	1.658.675.750	1.633.928.200	98,51
	➤ Kegiatan Sekolah Lapang Tata Guna Air (SL-TGA)	40	-	0	11.530.000	-	-
	➤ Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	3.300	7.200	2,18	7.694.822.000	7.049.319.345	91,61
	➤ Fasilitasi LP2B	1	-	0	54.879.250	5.114.000	9,32



Akuntabilitas keuangan merupakan pencapaian kinerja keuangan dari masing-masing program kegiatan yang telah ditetapkan. Pengukurannya berdasarkan persentase rata-rata realisasi anggaran pada masing-masing program dan kegiatan. Dari keseluruhan program kegiatan secara umum kegiatan sekretariat/rutin saja yang bisa dilaksanakan secara optimal. Adanya surat dari Bupati Pasuruan nomor 900/424.102/2020 tanggal 1 April 2020 perihal penghematan sementara Belanja Daerah tahun 2020 dalam rangka penanganan pandemi Covid 19 menyebabkan banyak program/kegiatan yang tidak dilaksanakan. Selain itu ada kegiatan yang bersumber dari DBHCHT tidak dilaksanakan karena breakdown kegiatan tidak sesuai dengan PMK Nomor 7/PMK.07/2020 Tentang Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Dana Bagi Hasi Cukai Hasil Tembakau. Sehingga pada akhirnya realisasi belanja dan kinerja Dinas Pertanian kurang optimal.



Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Meningkatnya produksi tanaman pangan, Hortikultura dan perkebunan	% Peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan							
	➤ % Peningkatan produksi tanaman pangan	0,4 %	8.09%	2022.50%	13,993,803,572	6,892,451,097	49.25	19.732
	➤ % Peningkatan produksi tanaman buah tahunan	0,4 %	0.48%	120.00%	-	-	-	-
	➤ % Peningkatan produksi tanaman sayur	0,4 %	0.56%	140.00%	808,096,034	786,108,334	97.28	0.427
	➤ % Peningkatan produksi tanaman hias	0,4 %	0.36%	90.00%	156,347,000	149,411,000	95.56	-0.056
	➤ % Peningkatan produksi tanaman perkebunan	0,4 %	0.99%	247.50%	472,301,399.74	115,540,800.00	24.46	2.230
Meningkatnya usaha pertanian dan perkebunan yang terstandarisasi	Jumlah produk hasil pertanian/agribisnis yang terstandarisasi	5 macam	4 macam	80%	13,993,803,572	6,892,451,097	49.25	19.732
	Persentase peningkatan komoditas pertanian dan perkebunan yang terstandarisasi	36%	28.57%	79.36 %	1.479.583.000	1.361.221.150	92	113,17



Tabel 2.1

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan  
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021

Kabupaten Pasuruan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2023 (Kondisi Akhir)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020		Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Tahun 2021)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2021	
					Target Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Tahun 2021)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
<b>2020</b>										
	Urusan Pilihan									
	Bidang Urusan Pertanian									



<b>I</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>% pemenuhan pelayanan kantor</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>			
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran listrik / air / telepon	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%			
2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya anggaran Peralatan listrik dan kebersihan	-	12 bulan	-	-	-			
		Jml pembelian peralatan an perlengkapan kantor	20 unit	-	10 unit	1 unit	10%			
3	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya anggaran Pemeliharaan peralatan kerja	-	12 bulan	-	-	-			
		Jml peralatan yang diperbaiki	40 Unit	-	10 unit	10 unit	100%			
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya anggaran pengadaan ATK	-	12 bulan	-	-	-			
		Jumlah pembelian ATK	20 kali	-	4 kali	4 kali	100%			





5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya anggaran pengadaan barang cetakan dan penggandaan	-	12 bulan	-	-	-			
		Jml pembelian barang cetakan dan penggandaan	240.000 eksemplar	-	60.000 eksemplar	60.000 eksemplar	100%			
6	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya anggaran pengadaan makanan dan minuman	-	12 bulan	-	-	-			
		Jml Kegiatan rapat dan tamu	2848 kali	-	712 kali	712 kali	100%			
7	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Tersedianya anggaran perjalanan dinas luar daerah	-	12 bulan	-	-	-			
		Jml perjalanan dinas ke luar daerah	720 kali	-	180 kali	180 kali	100%			
8	Penyediaan Jasa Perkantoran	Tersedianya anggaran administrasi perkantoran	-	12 bulan	-	-	-			



		Honor tenaga kontrak/THL	104 orang	-	26 orang	25 orang	96.15%			
9	Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan	Laporan kinerja tribulanan dan tahunan	64 dokumen	-	16 dokumen	16 dokumen	100%			
<b>II</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	% sarpras kondisi baik	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>53%</b>	<b>53%</b>			
1	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dibangun	-	1 pkt	-	-	-			
		Jumlah pembangunan gedung	4 unit	-	1 unit	1 unit	100%			
2	Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional	Jumlah pengadaan kendaraan	1 unit	-	1 unit	-	0%			
3	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	-	2 paket	-	-	-			
		Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	7 paket	-	3 paket	2 paket	66.67%			



4	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	7 paket	-	3 paket	0	0%			
5	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya anggaran pemeliharaan kendaraan dinas	-	12 bulan	-	-	-			
		Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas	28 unit	-	7 unit	7 unit	100%			
<b>III</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS BAHAN BAKU</b>	<b>% Peningkatan Petani Tembakau yang terlatih</b>	<b>25%</b>	<b>50%</b>	<b>25%</b>					
1	Penerapan Inovasi Teknis	Terselenggaranya SL, temu usaha, terbentuknya asosiasi petani tembakau	825 orang	-	165 orang	-	-			
2	Penumbuhan dan Penguatan Kelembagaan	Jumlah peserta pelatihan penerapan grade tembakau	150 orang	180 orang	30 orang	-	-			



3	Penanganan Panen dan Pasca Panen	Jumlah bantuan yang diberikan kepada kelompok tani	-		2 Pkt	2 Pkt	100%			
<b>IV</b>	<b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN DAN PERKEBUNAN</b>	<b>% kelompok tani yang memiliki jangkauan pemasaran tingkat nasional</b>	<b>0,16%</b>	<b>0.88</b>	<b>0,4%</b>					
1	Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis	Jumlah petani yang mengikuti pelatihan di bidang agribisnis	200 orang	40 orang	40 orang	-	-			
2	Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani	Jumlah kelompok tani peserta lomba agribisnis pertanian (horti dan pangan)	-	2 kelompok tani	-	-	-			
		Jumlah kelompok tani agribisnis pertanian (horti dan pangan) yang naik kelas	10 klpk tani agribis	-	2 klpk tani agribis	2 klpk tani agribis	100%			



3	Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian	Jumlah peserta pelatihan pasca panen dan pengolahan hasil	350 orang	50 orang	75 orang	-	-			
4	Promosi atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggul Daerah	Frekuensi promosi produk unggulan pertanian dan perkebunan tingkat nasional dan regional	100 kali	15 kali	20 kali	20 kali	100%			
<b>V</b>	<b>PROGRAM PRODUKSI TANAMAN PERKEBUNAN</b>	<b>% Peningkatan produksi Tanaman pangan dan hortikultura</b>	<b>0.7%</b>	<b>0.3%</b>	<b>0.4%</b>					
1	Penyuluhan Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan (SLPHT Tanaman Perkebunan Tahunan)	Jml klpk tani peserta SL PHT tanaman perkebunan tahunan	15 klpk tani	3 KT	2 klpk tani	2 klpk tani	100%			
2	Sekolah Lapang Agensi Hayati (SLAH) Tanaman Perkebunan	Jml klpk tani peserta SL AH tanaman perkebunan semusim	10 klpk tani	2 klpk tani	2 klpk tani	-	-			



3	Pengembangan Tanaman Perkebunan	Luas areal perkebunan	-	15 ha	-	-	-			
		Jumlah Bibit yang didistribusikan kepada KT	52.000 btg	-	13.000 btg	-	-			
<b>VI</b>	<b>PROGRAM PRODUKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA</b>	<b>% Peningkatan produksi Tanaman pangan dan hortikultura</b>	<b>0.7%</b>		<b>0.4%</b>					
1	Pengembangan Perbenihan/Perbibitan	Luas lahan pengembangan benih padi & palawija	-	5 Ha	-	-	-			
		Tersedianya Benih Padi, Palawija	2,400 Kg	-	600 kg	600 kg	100%			
2	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Perkebunan, Produk Pertanian	Jml klpk tani penerima kegiatan intensifikasi Tanaman Pangan	12 KT	24 Kecamatan	4 klpk tani	-	0%			
3	Pengembangan Tanaman Sayuran Organik	Jml kelompok tani penerima pengembangan sayuran organik	10 klpk tani	-	2 klpk tani	0	0%			



4	Pengembangan Agribis Hortikultura	Tersedianya anggaran pendamping program/kegiatan APBN tan hortikultura	-	12 bulan	-	-	-			
		Jml Bibit yang diberikan ke masyarakat	56.000 btg	-	14.000 btg	-	0%			
5	Pelatihan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Modern Bercocok Tanam	Jml kelompok tani peserta pelatihan metode tanam SRI	10 klpk tani	2 klpk tani	6 klpk tani	2 klpk tani	33%			
6	Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Pertanian	Luas lahan yang digunakan untuk pengembangan benih kentang berlabel	-	4 ha						
		Jumlah Benih kentang yang bersertifikasi	300,000 knol	-	75.000 Knol	75.000 Knol	100%			
7	Pengelolaan Kebun Bibit Dinas Hortikultura	Jml Kebun dinas hortikultura yang dikelola	2 unit	-	2 unit	2 unit	100%			
8	Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/perkebunan	Jml Kebun dinas hortikultura yang dikelola	-	1 unit	-	-	-			



9	Sekolah Lapang Tanaman Pangan dan Horti	Jumlah KT peserta SL	16 KT	-	4 KT	-	-			
10	Sekolah Lapang Agensi Hayati (SLAH) Tanaman Pangan dan Horti	Jml klp tani peserta SL AH	-	2 klp tani	-	-	-			
<b>VII</b>	<b>PROGRAM SARANA DAN PRASARANA HASIL PERTANIAN</b>	<b>% Penurunan Lahan Marginal</b>	<b>1,20%</b>		<b>1.16%</b>					
1	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Sarpras Pertanian	Dokumen Laporan Monitoring dan evaluasi	4 Dokumen	24 Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%			
2	Pengelolaan Lahan dan Air	Dokumen Laporan Perencanaan Pengelolaan Lahan dan Air	8 Dokumen	12 bulan	2 Dokumen	2 Dokumen	100%			
3	Sekolah Lapang Iklim	Jumlah Kelompok tani peserta Sekolah Lapang Iklim	10 kelompok Tani	2 kelompok tani	2 kelompok tani	-	-			
4	Optimalisasi Alat Mesin Pertanian	Jumlah Alsintan yang diberikan kepada KT	-	12 bulan	-	-	-			





		Jumlah Anggota KT yang memiliki ketrampilan pengoperasian Alsintan	160 orang	-	40 org	-	-				
5	Pembangunan/Rehabilitasi Irigasi Air Tanah	Jumlah irigasi tanah dangkal yang dibangun/direhab	63 paket	21 paket	12 paket	-	-				
6	Pembangunan Jaringan Irigasi Tersier	Jumlah irigasi tersier yang dibangun/direhab	-	10 paket	-	-	-				
		Panjang irigasi tersier yang dibangun/direhab	9.600 mtr	-	2.400 mtr	2.250 mtr	93.75%				
7	Sekolah Lapang Tata Guna Air (SL-TGA)	Jumlah peserta SL TGA	200 orang	40 orang	40 orang	-	-				
8	Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	Jml jalan usaha tani yang dibangun/direhab	-	77 paket	-	-	-				
		Panjang jalan usaha tani yang dibangun/direhab	9.900 mtr	-	3.300 mtr	7.200 mtr	218%				
9	Fasilitasi LP2B	Terdatanya Jumlah Lokasi LP2B	-	1 paket	-	-	-				



		Dokumen pelaporan LP2B	4 Dokumen	-	1 Dokumen	0	0%			
							0			
<b>2021</b>										
<b>I</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan</b>	<b>100%</b>					<b>100%</b>		
<b>1</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>									
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja yang disusun						2 Dokumen		
<b>2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>									
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN						44 orang - bulan		



2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pembayaran Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan melalui perjanjian/perikatan						501 orang - bulan		
<b>3</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>									
3.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor						40 Unit		
3.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik						42 Jenis		
3.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah pembelian barang cetakan dan penggandaan						36 Jenis-kali		
3.4	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah penyediaan konsumsi tamu dan rapat						1426 kali		
3.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan koordinasi dan perjalanan dinas keluar daerah						24 Laporan		



<b>4</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>								
4.1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor						3 Unit	
4.2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang diadakan						1 Unit	
<b>5</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>								
5.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran listrik / air / telepon						36 rekening	
<b>6</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>								



6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						8 Unit		
6.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya						73 Unit		
6.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						1 Unit		
6.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Dokumen Perencanaan untuk pengembangan Kebun Dinas.						2 Dokumen		
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>	<b>Persentase sarana pertanian yang tertangani</b>						<b>75%</b>		



<b>1.</b>	<b>Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian</b>								
1.1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Luas areal pengembangan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan						25 Ha	
1.2	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	jumlah kelompok tani yang mengikuti bimtek on farm dan off farm						13 KT	
<b>III</b>	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>	<b>Persentase Lahan Marginal yang tertangani</b>	<b>1.20%</b>					<b>1.18%</b>	
<b>1.</b>	<b>Pengembangan Prasarana Pertanian</b>								
1.1	Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Jumlah Dokumen Pelaporan LP2B						1 Dokumen	



1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Jumlah KT yang memiliki ketrampilan menggunakan prasarana pendukung pertanian						2 KT		
<b>2</b>	<b>Pembangunan Prasarana Pertanian</b>									
2.1	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Panjang irigasi tersier yang dibangun/direhab						2500 meter		
2.2	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Panjang jalan usaha tani yang dibangun/direhab						3000 meter		
<b>IV</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>	<b>Persentase serangan OPT yang dapat ditanggulangi</b>						<b>75%</b>		
<b>1</b>	<b>Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota</b>									



1.1	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah kelompok tani peserta Sekolah Lapang Pengendalian OPT						7 KT		
1.2	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Kelompok tani peserta Sekolah Lapang Iklim						6 KT		
<b>V</b>	<b>PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN</b>	<b>Persentase ijin usaha pertanian yang tertangani</b>						<b>75%</b>		
<b>1</b>	<b>Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>									
1.1	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah KT yang mengikuti pelatihan usaha di bidang agribisnis						5 KT		





VI	<b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>	<b>Persentase peningkatan kelompok tani yang berwawasan agribisnis</b>						2%		
1	<b>Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</b>									
1.1	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah kelompok tani yang terbina di bidang manajemen usaha kelompok						2 KT		



Namun demikian Perbandingan antara pencapaian kinerja dan anggaran pada tabel diatas tidak bisa serta merta ditetapkan tingkat efisiensinya karena ada satu anggaran kegiatan yang digunakan untuk mendukung pencapaian beberapa indikator sasaran karena pada dasarnya ada beberapa alokasi anggaran yang bersifat multiplier effect bagi indikator lainnya. Selain itu pada masing-masing indikator bisa jadi dibiayai oleh anggaran yang bersumber dari non APBD Kabupaten (APBN) sehingga meskipun anggaran dari APBD kecil tapi tingkat pencapaiannya besar.

## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Sektor pertanian mencakup berbagai kepentingan yang tidak saja untuk memenuhi kepentingan penyediaan pangan bagi masyarakat tetapi juga kepentingan yang luas dan multifungsi. Selain sebagai sektor utama yang menjadi tumpuan ketahanan pangan, sektor pertanian memiliki fungsi strategis lainnya termasuk untuk menyelesaikan persoalan-persoalan lingkungan dan sosial (kemiskinan, keadilan dan lain-lain) serta fungsinya sebagai penyedia sarana wisata (agrowisata).

Dari sisi anggaran, Dinas Pertanian Kabupaten Pasuruan mendapatkan alokasi anggaran yang meningkat dari tahun ke tahun. tabel dibawah ini memperlihatkan jumlah alokasi anggaran 2014-2020 beserta serapannya sebagai berikut :



Tabel 2.3 Alokasi Anggaran Tahun 2014-2020

No	Tahun	Jml Anggaran	Realisasi	%
1.	2014	8.074.904.313	7.278.046.962	97,16%
2.	2015	37.840.476.239	14.308.530.400	37,81%
3.	2016	41.890.269.892	39.066.120.366	93,26%
4.	2017	25.075.971.095	22.244.511.823	88,71%
5.	2018	32.993.601.700	30.652.727.175	92,90%
6.	2019	38.224.018.050	34.603.527.538	90,53%
7.	2020	18.358.821.477	13.039.161.209	71,02%

Adapun permasalahan penyerapan anggaran yang ada seringkali disebabkan karena beberapa kegiatan dilaksanakan pada APBD perubahan di Bulan Oktober sehingga ada keterbatasan waktu dalam melaksanakan kegiatan, peraturan baru atau Surat Edaran tentang badan, lembaga, dan organisasi yang berbadan hukum sebagai penerima bantuan hibah serta kecermatan dalam menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) yang menjadi pedoman pelaksanaan program/kegiatan baik dari sisi anggaran maupun dari indikator kinerja turut menentukan serapan dan alokasi anggaran yang dibutuhkan. Permasalahan anggaran di Dinas Pertanian Kabupaten Pasuruan juga berkaitan dengan belum di milikinya Analisis Standar Biaya (ASB) untuk Program/kegiatan yang dilaksanakan, sehingga tidak ada standar baku yang dapat diterapkan dalam alokasi anggaran untuk tiap Kegiatan, sehingga penentuan alokasi anggaran untuk kegiatan tersebut tidak memiliki dasar yang secara normatif maupun akademik dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan Urusan pertanian merupakan Urusan Pilihan. Namun urusan pertanian merupakan prioritas di dalam mengembangkan pembangunan dan penguatan perekonomian masyarakat di pedesaan. Oleh karenanya capaian kinerja pelayanannya lebih banyak dianalisis dari sudut pandang tugas pokok dan fungsi dan juga indikator kinerja output yang dihasilkan dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

**Tabel 2.2**

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....

Kabupaten Pasuruan

No	Indikator	SPM/ Standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Cata tan Anali sis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)

Nihil



### **2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD**

Dinas Pertanian sebagai salah satu OPD teknis yang ada di daerah mempunyai keterkaitan dalam hal tugas pokok dan fungsi dengan Dinas Pertanian Provinsi dan Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Ada keterkaitan yang cukup mendasar pada program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan pembangunan pertanian yang berkelanjutan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya isu-isu penting akan timbul di lapang yang harus disikapi oleh Dinas Pertanian.

Walaupun demikian masih ada beberapa isu penting yang dihadapi oleh Dinas Pertanian dalam melaksanakan pembangunan pertanian. Permasalahan itu antara lain :

1. Alih fungsi lahan pertanian secara terus menerus berdampak terhadap produk pertanian secara umum
2. Alih teknologi pertanian belum sepenuhnya diterapkan
3. Penanganan Pasca panen serta branding komoditas pertanian dan perkebunan yang kurang optimal
4. Petani belum mengelola usaha pertanian yang dijalankan secara profesional

Terhadap kondisi yang ada di atas maka usaha yang harus dilaksanakan pada masa yang akan datang adalah :

1. Harus segera ditetapkan kawasan LP2B
2. Memberikan Sekolah Lapang Aplikasi Teknologi tepat guna dengan harga murah dan penggunaan yang mudah oleh petani
3. Memberikan Bimbingan / pelatihan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian serta promosi produk unggulan baik pada even lokal, regional maupun nasional
4. Memberikan bimbingan tentang pentingnya agribisnis (manajemen usaha tani mulai dari hulu sampai hilir).

Dari beberapa isu strategis di atas bisa menjadi tantangan sekaligus peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Pertanian terhadap masyarakat. Apabila masing-masing isu strategis berlanjut tanpa penanganan yang tepat akan berpotensi sebagai penghambat pelaksanaan pembangunan pertanian. Sebaliknya bila masing-masing isu strategis ditangani secara tepat maka akan menjadi peluang yang besar pula dalam pembangunan pertanian.



#### **2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

RKPD mempunyai nilai strategis dalam pelaksanaan pembangunan suatu daerah. Nilai strategis tersebut antara lain :

1. Sebagai instrumen untuk mengoperasikan RPJMD
2. Menjadi acuan penyusunan rencana kerja SKPD
3. Memberikan gambaran konsistensi program dan sinkronisasi pencapaian sasaran antara RKPD dengan RPJMD
4. Menjadi pedoman dalam penyusunan KUA dan PPAS
5. Menjadi pedoman penyusunan program dan kegiatan penyelenggaraan urusan dan lintas urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD.



## **2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Pasuruan perlu adanya partisipasi masyarakat dari tingkat kelurahan/desa sampai dengan tingkat kecamatan. Sehingga pembangunan yang dilaksanakan akan menyentuh lapisan masyarakat bawah dan dapat menjawab kebutuhan masyarakat secara langsung.

Sebagai implementasi di dalam mengaspirasi kebutuhan masyarakat, maka Dinas Pertanian aktif mengikuti Musrenbang (musyawarah rencana pembangunan) yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan dengan Bappeda sebagai leading sektornya. Selain itu Dinas Pertanian juga melaksanakan forum Perangkat Daerah dengan mengundang stakeholder sebagai langkah menentukan prioritas program dan kegiatan agar tercapai sinergi dan sinkronisasi dengan usulan dari masyarakat.

Melalui musrenbang dan forum Perangkat Daerah akan terhimpun usulan-usulan program dan kegiatan yang akan diwujudkan dalam program dan kegiatan Dinas Pertanian dengan tetap berpegang pada skala prioritas pembangunan.

Dari usulan-usulan program dan kegiatan yang diperoleh dari musrenbang dan forum Perangkat Daerah secara umum berupa pembangunan/rehabilitasi sarana fisik seperti Pengembangan Jaringan Irigasi dan jalan pertanian; bantuan alat mesin pertanian berupa handsprayer, power sprayer, alat tanam jagung; Sekolah Lapang Agensia Hayati, Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu, Sekolah Lapang Iklim, SL Cengkeh, SL Kopi, SL Kelapa; Pengembangan tanaman padi, jagung, kedelai, durian unggul lokal, mangga, sedap malam, krisan, kentang, paprika, kelapa, tebu, cengkeh, kopi ; Pembangunan/Rehabilitasi Jalan pertanian; Budidaya tanaman padi menggunakan Metode SRI, Metode Jajar Legowo ; Bantuan alat pasca panen kopi serta beberapa kegiatan untuk dana bagi hasil cukai tembakau.



### **BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Pembangunan pertanian secara nasional adalah memposisikan kembali pertanian sebagai motor penggerak pembangunan nasional melalui pencapaian 4 Target Utama pembangunan pertanian ke depan, yaitu: (1) pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan, (2) peningkatan diversifikasi pangan, (3) peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor, dan (4) peningkatan kesejahteraan petani. Upaya mencapai target utama pembangunan pertanian di atas tentu tidaklah mudah, karena dihadapkan pada kondisi permasalahan dan tantangan pembangunan pertanian yang tidak ringan.

Mengacu pada Isu Strategis dalam Prioritas Pembangunan Nasional pada salah satu Bidang Pembangunan yaitu pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup memuat isu strategis terkait penguatan ketahanan pangan. Berbicara masalah ketahanan pangan secara otomatis Dinas Pertanian ikut terlibat dalam hal penyediaan pangan bagi masyarakat khususnya komoditas tanaman utama (padi, Jagung, kedelai), tanaman hortikultura terutama komoditas buah-buahan dan sayuran serta tanaman perkebunan (tebu, kelapa, kopi, cengkeh, kapuk randu dan kenanga)

Dalam kerangka operasional, arah kebijakan itu didukung sembilan upaya revitalisasi pembangunan pertanian berkelanjutan, meliputi :

1. Revitalisasi regulasi agraria
2. Penguatan infrastruktur pertanian, terutama jaringan irigasi
3. Revitalisasi input produksi
4. Pengembangan SDM pertanian
5. Pengembangan alat dan mesin pertanian yang berkarakter Indonesia
6. Revitalisasi kelembagaan pertanian
7. Pembiayaan usaha pertanian
8. Koordinasi lintas sektor, dan
9. Penguasaan teknologi merespon dinamika dan perubahan iklim





### **3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

Tujuan Renja Dinas Pertanian adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu tahun berjalan. Tujuan Renja merupakan bagian dari tujuan Renstra Dinas Pertanian. Adapun tujuan Dinas Pertanian adalah sebagai berikut :

**“Meningkatkan produktivitas sektor pertanian dan perkebunan dengan mendorong perkembangan ekonomi kreatif”**

Sasaran adalah suatu kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh instansi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan. Sasaran merupakan bagian integral yang akan dicapai secara nyata melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan sehingga dapat memberi arah terhadap alokasi sumber daya yang telah dipercayakan kepada instansi yang bersangkutan.

Adapun sasaran yang akan dicapai dari renja Dinas Pertanian adalah :

1. Meningkatnya produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan
2. Meningkatnya usaha pertanian dan perkebunan yang terstandarisasi

### **3.3. Program dan Kegiatan**

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian menetapkan rumusan program dan kegiatan berdasarkan Permendagri No. 59 tahun 2007 dan Undang - Undang No 23 tahun 2014 ditambah dengan kegiatan inovasi yang mendukung pencapaian target indikator kinerja dalam Renstra dan RPJMD.

Selain itu, berpijak pada kebijakan nasional dan provinsi sebagaimana tersebut di atas, Dinas Pertanian Kabupaten Pasuruan sebagai SKPD yang menangani bidang pembangunan pertanian dalam programnya telah mengacu pada program nasional tersebut. Berdasarkan hasil verifikasi Dinas Pertanian menetapkan program pada tahun 2022 sebagai berikut :

- ❖ Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- ❖ program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian
- ❖ program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian



- ❖ program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian
- ❖ program perizinan usaha pertanian
- ❖ program penyuluhan pertanian

Pemilihan program dan kegiatan di atas diharapkan dapat mewadahi pembangunan pertanian dalam arti luas karena Kabupaten Pasuruan mempunyai potensi dari dataran rendah sampai dataran tinggi/pegunungan dimana potensi yang ada tersebut dapat dikembangkan beberapa komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang merupakan komoditas unggulan daerah.

Adapun komoditas unggulan yang dibudidayakan antara lain : padi, jagung, kedelai. Tanaman hortikultura unggulan adalah Kentang dengan daerah potensi Kecamatan Tosari, Lumbang dan Puspo. Paprika, Krisan dan Apel dengan daerah potensi Kecamatan Tukur. Sedap malam dan mangga dengan daerah potensi kecamatan Rembang. Durian meliputi kecamatan Purwodadi, Purwosari, Tukur, Puspo, Pasrepan, Prigen, Sukorejo dan Lumbang. Sedangkan tanaman perkebunan meliputi Tebu, kelapa, kopi dan cengkeh

Untuk pengembangan potensi daerah melalui pengembangan komoditas-komoditas unggulan tersebut, maka Dinas Pertanian Kabupaten Pasuruan menetapkan 6 program 12 kegiatan 26 Sub kegiatan dengan sumber anggaran yang berasal dari DAU (Dana Alokasi Umum), DAK (Dana Alokasi Khusus) dan DBHCHT (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau).

### **Keragaman Program Tahun 2022**

#### **a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Program ini diarahkan untuk penyediaan administrasi perkantoran untuk pelaksanaan program dan kegiatan.

Dalam implementasinya pelaksanaan program di atas diwujudkan dalam beberapa jenis kegiatan dan sub kegiatan operasional sebagai berikut :

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN



- 3) Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - Fasilitasi Kunjungan Tamu
  - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 4) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
  - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

**b. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian**

Program ini diarahkan untuk penyediaan sarana pertanian untuk kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan. Adapun implementasi dari program ini diwujudkan pada kegiatan sebagai berikut :

- 7) Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Pengadaan Perlengkapan Gedung/Kantor
  - Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
  - Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian

**c. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian**

Program ini diarahkan pada bimbingan, pengembangan dan penyediaan sarana prasarana teknologi tepat guna untuk meningkatkan produksi dan



produktivitas tanaman pangan dan hortikultura. Adapun program ini diwujudkan dalam kegiatan sebagai berikut :

- 8) Pengembangan Prasarana Pertanian
  - Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B
  - Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya
- 9) Pembangunan Prasarana Pertanian
  - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
  - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
  - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya

**d. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian**

Program ini diarahkan kepada usaha untuk peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura. Dalam operasionalnya, program ini terwujud dalam kegiatan sebagai berikut :

- 10) Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota
  - Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
  - Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan

**e. Program Perizinan Usaha Pertanian**

Program ini diarahkan untuk meningkatkan produktivitas pendapatan sekaligus memasarkan hasil-hasil yang telah dicapai dalam pertanian baik berupa produk olahan maupun produk segar yang akhirnya dapat memberikan value added (nilai tambah) terhadap produk yang dihasilkan agar petani lebih sejahtera. Program ini diwujudkan pada kegiatan operasional sebagai berikut :

- 11) Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
  - Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian



**f. Program Penyuluhan Pertanian**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan melalui pembinaan manajemen kelompok tani.

Program ini meliputi :

- 12) Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Sekolah Lapang Agensi hayati (SL AH) tanaman perkebunan
  - Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa



## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Bagi perangkat daerah, Rencana Kerja dan Pendanaan harus ditindaklanjuti dengan menyusun kebijakan publik baik dalam kerangka deregulasi maupun kerangka anggaran dalam APBD Tahun 2022 yang dalam pelaksanaannya dengan memaksimalkan sumber daya yang ada terutama sumber daya anggaran. Penyusunan kerangka pendanaan ini didasarkan pada skala prioritas dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Mengingat keterbatasan sumber daya anggaran, pelaksanaan program pembangunan yang ditetapkan harus benar-benar dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat luas. Disamping itu seluruh bidang harus membuat rencana aksi dalam upaya penggalan dan memobilisasi sumber-sumber pembiayaan pembangunan yang berasal dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi maupun APBN. Adapun rencana kerja beserta pendanaan disajikan dalam tabel 3.1. sebagaimana terlampir.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2017 Tentang Kawasan Sains Dan Teknologi menyatakan bahwa dalam rangka memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya industri, khususnya industri kecil menengah berbasis inovasi, perlu menyediakan layanan bagi industri dalam suatu kawasan yang disiapkan secara khusus, dan wahana yang akan memfasilitasi aliran invensi menjadi inovasi untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing

Dalam rangka mengembangkan dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, Perpres No. 80 tahun 2019 mengimplementasikan Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan maka rencana tindak Lanjut Kabupaten Pasuruan adalah Pembangunan Agropolitan Tuter berupa pembangunan rest area yang berlokasi di Kebun Dinas Tuter dengan anggaran yang ada di Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran serta rencana pembangunan Arjuno Technopark di Desa Sumberrejo Kecamatan Purwosari.



Kondisi eksisting kebun dinas Tutur saat ini digunakan untuk lahan tanaman sayuran sebagai penghasil PAD. Namun demikian di areal kebun dinas sudah terdapat beberapa bangunan berupa lahan parkir, gedung serbaguna, 2 unit homestay, gazebo dan bangunan kandang. Untuk mengoptimalkan fungsi kebun dinas sebagai lokasi rest area maka perlu disusun DED (Detail engineering Design) sebagai dasar dalam pelaksanaan pembangunan. Sedangkan untuk UPT Arjuno Technopark Dinas Pertanian mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mempersiapkan secara teknis pembentukan Arjuno Technopark bidang pertanian. Rencana program / kegiatan pendukung Arjuno Technopark dari Dinas Pertanian Kabupaten Pasuruan terdiri dari pengembangan tanaman hortikultura dan tanaman perkebunan selama 3 dimana tahun 2021 sebesar Rp 153.295.000, tahun 2022 sebesar Rp. 543.382.500 dan tahun 2023 sebesar Rp. 101.938.600. Tahun berjalan dimulai dengan Anggaran Perubahan tahun 2021 dengan sumber dana DAU dengan lahan seluas 1Ha sebesar Rp. 153.295.000 berupa pengembangan tanaman hortikultura komoditas Bibit Durian, Alpukat dan Sedap Malam.

Untuk Tahun Anggaran 2022 dengan lahan seluas 8Ha pengembangan tanaman hortikultura sebesar Rp. 443.305.000 untuk Bibit Durian, Alpukat, Mangga, Jeruk, Apel, Sedap Malam, Krisan, Kumbung Krisan, dan Kumbung Hidroponik, sedangkan komoditas tanaman perkebunan sebesar Rp. 100.077.500 berupa bibit Cengkeh, Kelapa Genjah, Kopi Robusta dan Kakao. Dan untuk tahun 2023 komoditas Hortikultura menggunakan anggaran sebesar Rp. 84.395.000 berupa bibit Durian, Alpukat, Mangga, Jeruk dan Apel, kemudian untuk komoditas Perkebunan sebesar Rp. 17.543.600 berupa bibit Cengkeh, Kelapa Genjah, Kopi Robusta dan Kakao. Kemudian untuk mendukung sarana penunjang di showroom yang ada di Arjuno Technopark Dinas Pertanian menganggarkan sebesar Rp. 200.000.000 untuk produk pertanian yang akan di sediakan di showroom.

Mengingat keterbatasan sumber daya anggaran, pelaksanaan program pembangunan yang ditetapkan harus benar-benar dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat luas. Disamping itu seluruh bidang harus membuat rencana aksi dalam upaya penggalan dan memobilisasi sumber-sumber pembiayaan pembangunan yang berasal dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi maupun APBN. Adapun rencana kerja beserta pendanaan disajikan dalam tabel 3.1. sebagaimana terlampir.







<b>.2.01</b>	<b>Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>								
						<b>Rp30,750,000</b>			<b>Rp75,000,000</b>
3.27.1. 2.01.1	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja yang disusun	Kab Pasuru an	2 Dokumen		Rp30,750,000	DAU	2 Dokumen	Rp75,000,000
						<i>Belanja operasi</i>	: Rp30,750,000		<i>Rp75,000,000</i>
						Belanja pegawai	: Rp-		Rp-
						Belanja barang dan jasa	: Rp30,750,000		Rp75,000,000
						Belanja bunga	: Rp-		Rp-
						Belanja subsidi	: Rp-		Rp-
						Belanja hibah	: Rp-		Rp-
						Belanja bantuan sosial	: Rp-		Rp-
						<i>Belanja modal</i>	: Rp-		<i>Rp-</i>
						<i>Belanja tidak terduga</i>	: Rp-		<i>Rp-</i>



					Belanja transfer	: Rp-			Rp-
3.27.1 .2.02	II <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>					<b>Rp17,923,913 ,000</b>			<b>Rp18,000,893,000</b>
3.27.1. 2.02.1	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	Kab Pasuru an	44 orang - bulan		Rp17,085,893, 000	DAU	44 orang - bulan	Rp6,500,000,000
					Belanja operasi	: Rp17,085,893,0 00			Rp17,085,893,000
					Belanja pegawai	: Rp17,085,893, 000			Rp17,085,893,000
					Belanja barang dan jasa	: Rp-			Rp-
					Belanja bunga	: Rp-			Rp-
					Belanja subsidi	: Rp-			Rp-
					Belanja hibah	: Rp-			Rp-
					Belanja bantuan	: Rp-			Rp-



				sosial				
					<i>Belanja modal</i> : Rp-			Rp-
					<i>Belanja tidak terduga</i> : Rp-			Rp-
					<i>Belanja transfer</i> : Rp-			Rp-
3.27.1. 2.02.2	2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pembayaran Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapan gan melalui perjanjian/pe rikatan	Kab Pasuru an	501 orang - bulan	Rp838,020,000	DAU	501 orang - bulan	Rp915,000,000
					<i>Belanja operasi</i> : Rp838,020,000			Rp915,000,000
					Belanja pegawai : Rp147,820,000			Rp165,000,000
					Belanja barang dan jasa : Rp690,200,000			Rp750,000,000
					Belanja bunga : Rp-			Rp-
					Belanja subsidi : Rp-			Rp-
					Belanja hibah : Rp-			Rp-



					Belanja bantuan sosial : Rp-				Rp-
					Belanja modal : Rp-				Rp-
					Belanja tidak terduga : Rp-				Rp-
					Belanja transfer : Rp-				Rp-
3.27.1 .2.06	III Administrasi Umum Perangkat Daerah				Rp137,715,620				Rp428,000,000
3.27.1. 2.06.2	1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab Pasuruan	40 Unit	Rp14,438,620	DAU		40 Unit	Rp63,000,000
					Belanja operasi : Rp14,438,620				Rp63,000,000
					Belanja pegawai : Rp-				Rp-
					Belanja barang dan jasa : Rp14,438,620				Rp63,000,000
					Belanja bunga : Rp-				Rp-
					Belanja subsidi : Rp-				Rp-



					Belanja hibah : Rp-				Rp-
					Belanja bantuan sosial : Rp-				Rp-
					Belanja modal : Rp-				Rp-
					Belanja tidak terduga : Rp-				Rp-
					Belanja transfer : Rp-				Rp-
3.27.1. 2.06.4	2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik	Kab Pasuruan	42 Jenis	Rp29,366,000	DAU		42 Jenis	Rp50,000,000
					Belanja operasi : Rp29,366,000				Rp50,000,000
					Belanja pegawai : Rp-				Rp-
					Belanja barang dan jasa : Rp29,366,000				Rp50,000,000
					Belanja bunga : Rp-				Rp-
					Belanja subsidi : Rp-				Rp-
					Belanja hibah : Rp-				Rp-
					Belanja bantuan : Rp-				Rp-



					sosial			
					<i>Belanja modal</i> : Rp-			Rp-
					<i>Belanja tidak terduga</i> : Rp-			
					<i>Belanja transfer</i> : Rp-			Rp-
3.27.1. 2.06.5	3 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah pembelian barang cetakan dan penggandaan	Kab Pasuru an	36 Jenis- kali	Rp26,531,000	DAU	36 Jenis-kali	Rp35,000,000
					<i>Belanja operasi</i> : Rp26,531,000			Rp35,000,000
					<i>Belanja pegawai</i> : Rp-			Rp-
					<i>Belanja barang dan jasa</i> : Rp26,531,000			Rp35,000,000
					<i>Belanja bunga</i> : Rp-			Rp-
					<i>Belanja subsidi</i> : Rp-			Rp-
					<i>Belanja hibah</i> : Rp-			Rp-
					<i>Belanja bantuan sosial</i> : Rp-			Rp-



					<i>Belanja modal</i> : Rp-				Rp-
					<i>Belanja tidak terduga</i> : Rp-				Rp-
					<i>Belanja transfer</i> : Rp-				Rp-
3.27.1. 2.06.8	4 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah penyediaan konsumsi tamu dan rapat		1426 kali	Rp17,380,000	DAU		1426 kali	Rp30,000,000
					<i>Belanja operasi</i> : Rp17,380,000				Rp30,000,000
					Belanja pegawai : Rp-				Rp-
					Belanja barang dan jasa : Rp17,380,000				Rp30,000,000
					Belanja bunga : Rp-				Rp-
					Belanja subsidi : Rp-				Rp-
					Belanja hibah : Rp-				Rp-
					Belanja bantuan sosial : Rp-				Rp-
					<i>Belanja modal</i> : Rp-				Rp-



					<i>Belanja tidak terduga</i> : Rp-				Rp-
					<i>Belanja transfer</i> : Rp-				Rp-
3.27.1. 2.06.9	5 Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan koordinasi dan perjalanan dinas keluar daerah		24 Laporan	Rp50,000,000	DAU		24 Laporan	Rp250,000,000
					<i>Belanja operasi</i> : Rp50,000,000				<i>Rp250,000,000</i>
					Belanja pegawai : Rp-				Rp-
					Belanja barang dan jasa : Rp50,000,000				Rp250,000,000
					Belanja bunga : Rp-				Rp-
					Belanja subsidi : Rp-				Rp-
					Belanja hibah : Rp-				Rp-
					Belanja bantuan sosial : Rp-				Rp-
					<i>Belanja modal</i> : Rp-				Rp-





					Belanja tidak terduga	: Rp-			Rp-
					Belanja transfer	: Rp-			Rp-
3.27.1 2.07	<b>IV</b> <b>Pengadaan</b> <b>Barang Milik</b> <b>Daerah Penunjang</b> <b>Urusan</b> <b>Pemerintah</b> <b>Daerah</b>					<b>Rp16,200,000</b>			<b>Rp618,100,000</b>
3.27.1 2.07.1 1	1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kab Pasuru an	3 Unit		Rp16,200,000	DAU	3 Unit	Rp68,100,000
					Belanja operasi	: Rp1,200,000			Rp3,100,000
					Belanja pegawai	: Rp-			Rp-
					Belanja barang dan jasa	: Rp1,200,000			Rp3,100,000
					Belanja bunga	: Rp-			Rp-
					Belanja subsidi	: Rp-			Rp-
					Belanja	: Rp-			Rp-



					hibah				
					Belanja bantuan sosial	: Rp-			Rp-
					Belanja modal	: Rp15,000,000			Rp65,000,000
					Belanja tidak terduga	: Rp-			Rp-
					Belanja transfer	: Rp-			Rp-
xxxxx	2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang diadakan	Kab Pasuruan	1 Unit		Rp-	DAU	1 Unit	Rp550,000,000
					Belanja operasi	: Rp-			Rp-
					Belanja pegawai	: Rp-			Rp-
					Belanja barang dan jasa	: Rp-			Rp-
					Belanja bunga	: Rp-			Rp-
					Belanja subsidi	: Rp-			Rp-
					Belanja hibah	: Rp-			Rp-



					Belanja bantuan sosial	: Rp-			Rp-
					Belanja modal	: Rp-			Rp550,000,000
					Belanja tidak terduga	: Rp-			Rp-
					Belanja transfer	: Rp-			Rp-
3.27.1 .2.08	V Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
						Rp464,168,328			Rp475,000,000
3.27.1. 2.08.2	1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran listrik / air / telepon	Kab Pasuruan	36 rekening		Rp464,168,328	DAU	36 rekening	Rp475,000,000
					Belanja operasi	: Rp464,168,328			Rp475,000,000
					Belanja pegawai	: Rp-			Rp-
					Belanja barang dan jasa	: Rp464,168,328			Rp475,000,000
					Belanja bunga	: Rp-			Rp-



					Belanja subsidi : Rp-				Rp-
					Belanja hibah : Rp-				Rp-
					Belanja bantuan sosial : Rp-				Rp-
					Belanja modal : Rp-				Rp-
					Belanja tidak terduga : Rp-				Rp-
					Belanja transfer : Rp-				Rp-
									Rp-
<b>3.27.1</b>	<b>VI</b>	<b>Pemeliharaan</b>							<b>Rp680,000,000</b>
<b>.2.09</b>		<b>Barang Milik</b>							
		<b>Daerah Penunjang</b>							
		<b>Urusan</b>							
		<b>Pemerintahan</b>							
		<b>Daerah</b>							
3.27.1. 2.09.1	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab Pasuru an	8 Unit	Rp108,497,980	DAU	8 Unit	Rp230,000,000



					<i>Belanja operasi</i> : Rp108,497,980				Rp230,000,000
					Belanja pegawai : Rp-				Rp-
					Belanja barang dan jasa : Rp108,497,980				Rp230,000,000
					Belanja bunga : Rp-				Rp-
					Belanja subsidi : Rp-				Rp-
					Belanja hibah : Rp-				Rp-
					Belanja bantuan sosial : Rp-				Rp-
					<i>Belanja modal</i> : Rp-				Rp-
					<i>Belanja tidak terduga</i> : Rp-				Rp-
					<i>Belanja transfer</i> : Rp-				Rp-
3.27.1. 2.09.6	2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Kab Pasuruan	73 Unit	Rp22,514,600	DAU		73 Unit	Rp50,000,000
					<i>Belanja operasi</i> : Rp22,514,600				Rp50,000,000
					Belanja : Rp-				Rp-



					pegawai				
					Belanja barang dan jasa : Rp22,514,600				Rp50,000,000
					Belanja bunga : Rp-				Rp-
					Belanja subsidi : Rp-				Rp-
					Belanja hibah : Rp-				Rp-
					Belanja bantuan sosial : Rp-				Rp-
					Belanja modal : Rp-				Rp-
					Belanja tidak terduga : Rp-				Rp-
					Belanja transfer : Rp-				Rp-
3.27.1. 2.09.9	3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab Pasuruan	1 Unit	Rp137400000	DAU		1 Unit	Rp200,000,000
					Belanja operasi : Rp-				Rp200,000,000
					Belanja : Rp-				Rp-



					pegawai				
					Belanja barang dan jasa : Rp-				Rp200,000,000
					Belanja bunga : Rp-				Rp-
					Belanja subsidi : Rp-				Rp-
					Belanja hibah : Rp-				Rp-
					Belanja bantuan sosial : Rp-				Rp-
					<i>Belanja modal</i> : Rp-				Rp-
					<i>Belanja tidak terduga</i> : Rp-				Rp-
					<i>Belanja transfer</i> : Rp-				Rp-
3.27.1.209.11	4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Dokumen Perencanaan untuk pengembangan Kebun Dinas	Kab Pasuruan	2 Dokumen	Rp-	DAU		2 Dokumen	Rp200,000,000
					<i>Belanja operasi</i> : Rp-				Rp200,000,000



					pegawai				
					Belanja barang dan jasa	: Rp219,664,000.00			Rp12,000,000
					Belanja bunga	: Rp-			Rp-
					Belanja subsidi	: Rp-			Rp-
					Belanja hibah	: Rp2,200,000,000			Rp1,950,000,000
					Belanja bantuan sosial	: Rp-			Rp-
					Belanja modal	: Rp-			Rp-
					Belanja tidak terduga	: Rp-			Rp-
					Belanja transfer	: Rp-			Rp-
3.27.0 3.2.02.03	2 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Panjang jalan usaha tani yang dibangun/direhab	Kab Pasuruan	3000 meter		Rp5,256,778,456	DAU	3000 meter	Rp10,055,500,000
					Belanja operasi	: Rp5,256,778,456			Rp10,055,500,000





					Belanja pegawai : Rp6,070,000				Rp5,500,000
					Belanja barang dan jasa : Rp316,930,000				Rp450,000,000
					Belanja bunga : Rp-				Rp-
					Belanja subsidi : Rp-				Rp-
					Belanja hibah : Rp4,933,778,456				Rp9,600,000,000
					Belanja bantuan sosial : Rp-				Rp-
					Belanja modal : Rp-				Rp-
					Belanja tidak terduga : Rp-				Rp-
					Belanja transfer : Rp-				Rp-
3.27.0 3.2.02.09	3 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah irigasi tanah dangkal yang dibangun/direhab	Kab Pasuruan	2 paket	Rp656,182,768	DAU		2 paket	Rp3,661,000,000
					Belanja operasi : Rp656,182,768				Rp3,661,000,000



					Belanja pegawai : Rp1,005,000				Rp1,000,000
					Belanja barang dan jasa : Rp61,495,000				Rp310,000,000
					Belanja bunga : Rp-				Rp-
					Belanja subsidi : Rp-				Rp-
					Belanja hibah : Rp593,682,768				Rp3,350,000,000
					Belanja bantuan sosial : Rp-				Rp-
					Belanja modal : Rp-				Rp-
					Belanja tidak terduga : Rp-				Rp-
					Belanja transfer : Rp-				Rp-
3.27.0 5	<b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>					<b>Rp774,508,99 0</b>			<b>Rp888,250,000</b>
3.27.0	<b>I Pengendalian dan</b>					<b>Rp774,508,99</b>			<b>Rp888,250,000</b>



5.2.01	<b>Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota</b>				<b>0</b>				
3.27.0 5.2.01. 01	1 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah kelompok tani peserta Sekolah Lapang Pengendalian OPT	Kab Pasuruan	7 KT	Rp738,232,190	DAU		7 KT	Rp764,250,000
					<i>Belanja operasi</i> : Rp738,232,190	DBHCHT			Rp764,250,000
					Belanja pegawai : Rp7,200,000				Rp8,250,000
					Belanja barang dan jasa : Rp731,032,190				Rp756,000,000
					Belanja bunga : Rp-				Rp-
					Belanja subsidi : Rp-				Rp-
					Belanja hibah : Rp-				Rp-
					Belanja bantuan sosial : Rp-				Rp-
					<i>Belanja modal</i> : Rp-				Rp-



					<i>Belanja tidak terduga</i> : Rp-				Rp-
					<i>Belanja transfer</i> : Rp-				Rp-
3.27.0 5.2.01. 02	2 Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Kelompok tani peserta Sekolah Lapang Iklim	Kab Pasuruan	6 KT	Rp36,276,800			6 KT	Rp124,000,000
					<i>Belanja operasi</i> : Rp36,276,800				Rp124,000,000
					Belanja pegawai : Rp-				Rp-
					Belanja barang dan jasa : Rp36,276,800				Rp124,000,000
					Belanja bunga : Rp-				Rp-
					Belanja subsidi : Rp-				Rp-
					Belanja hibah : Rp-				Rp-
					Belanja bantuan sosial : Rp-				Rp-
					<i>Belanja modal</i> : Rp-				Rp-



					Belanja tidak terduga : Rp-				Rp-
					Belanja transfer : Rp-				Rp-
3.27.0 6	<b>PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN</b>				<b>Rp26,100,800</b>				<b>Rp90,000,000</b>
3.27.0 6.2.01	<b>I Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>				<b>Rp26,100,800</b>				<b>Rp90,000,000</b>
3.27.0 6.2.01. 03	1 Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah KT yang mengikuti pelatihan usaha di bidang agribisnis	Kab Pasuru an	5 KT	Rp26,100,800			5 KT	Rp90,000,000
					Belanja operasi : Rp26,100,800				Rp90,000,000
					Belanja pegawai : Rp-				Rp-
					Belanja barang dan jasa : Rp26,100,800				Rp90,000,000
					Belanja : Rp-				Rp-





3.27.0 7.2.01. 02	1 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah kelompok tani yang terbina di bidang manajemen usaha kelompok	Kab Pasuruan	2 KT	Rp19,463,900	DAU	2 KT	Rp135,100,000
					<i>Belanja operasi</i> : Rp19,463,900			Rp135,100,000
					Belanja pegawai : Rp4,200,000			Rp5,100,000
					Belanja barang dan jasa : Rp15,263,900			Rp130,000,000
					Belanja bunga : Rp-			Rp-
					Belanja subsidi : Rp-			Rp-
					Belanja hibah : Rp-			Rp-
					Belanja bantuan sosial : Rp-			Rp-
					<i>Belanja modal</i> : Rp-			Rp-
					<i>Belanja tidak terduga</i> : Rp-			Rp-



					<i>Belanja transfer</i> : Rp-				Rp-
					<i>Total Belanja operasi</i> :	Rp30,583,880,235			<i>Rp38,746,354,826</i>
					<i>Belanja pegawai</i> :	Rp17,300,448,000			<i>Rp6,746,682,508</i>
					<i>Belanja barang dan jasa</i> :	Rp4,467,331,804			<i>Rp16,674,223,290</i>
					<i>Belanja bunga</i> :	Rp-			<i>Rp-</i>
					<i>Belanja subsidi</i> :	Rp-			<i>Rp-</i>
					<i>Belanja hibah</i> :	Rp8,257,360,346			<i>Rp15,100,637,337</i>
					<i>Belanja bantuan sosial</i> :	Rp558,740,085			<i>Rp224,811,691</i>
					<i>Total Belanja modal</i> :	Rp15,000,000			<i>Rp615,000,000</i>
					<i>Total Belanja tidak</i> :	Rp-			<i>Rp-</i>





					<i>terduga</i>				
					<i>Total Belanja transfer</i>	:	Rp-		Rp-
					<b>Total Belanja PD</b>	:	<b>Rp30,598,880,235.00</b>		<b>Rp39,361,354,825.67</b>

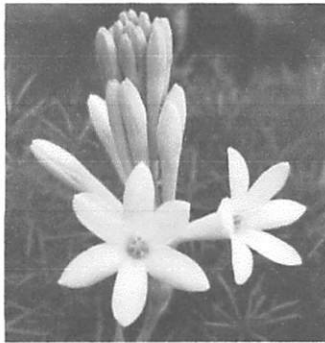


## BAB V. PENUTUP

### 4.1. Catatan Penting Yang Perlu Mendapat Perhatian

Melalui forum Musrenbangdes, forum Musrenbangcam, bahkan forum Organisasi Pemerintah Daerah (OPD), stakeholders menyampaikan masukan tentang prioritas kegiatan pembangunan yang hasilnya dituangkan dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2022 merupakan Renja di tahun ke-4 dalam periode Renstra tahun 2018-2023.

- Dalam menyusun Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian tahun 2022, selain harus berpedoman pada Renstra Dinas tahun 2018-2023 dan RKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2022, pimpinan satuan kerja juga mempertimbangkan hasil musrenbangkab yang merupakan dasar evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan serta catatan dan harapan kepala SKPD



- Adanya alih fungsi lahan dari lahan pertanian menjadi lahan non pertanian perlu disikapi segera
  - Anomali iklim, bencana alam dan serangan hama penyakit tanaman pada daerah kronis endemis berpengaruh terhadap produksi, produktivitas dan mutu produk yang berdampak pada harga jual masing-masing komoditas.
- Apabila ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan program dan kegiatan yang telah tercantum dalam Rencana kerja maka akan dipilih program dan kegiatan prioritas yang mendukung ketercapaian target kinerja dalam RPJMD.

### 4.2. Kaidah – Kaidah Pelaksanaan

Dalam kondisi kemampuan anggaran yang relatif terbatas, untuk optimalisasi potensi sumberdaya alam melalui kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah dan masyarakat, perlu dilakukan upaya koordinasi sehingga dapat menghilangkan pemborosan sumberdaya daerah. Oleh karena itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Pemerintah dan masyarakat serta berbagai pihak yang terkait mengupayakan semaksimal mungkin untuk mendukung program-



- program dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 dengan sebaik-baiknya;
2. Renja Dinas Pertanian tahun 2022 adalah dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program, kegiatan dan sub kegiatan baik yang bersumber APBD maupun APBN Dalam proses penyusunannya, Renja harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya RPJMN, RPJMD, RKPD dan RENSTRA Dinas Pertanian
  3. Dinas Pertanian sesuai tugas pokok dan fungsinya menjabarkan visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan ke dalam bentuk program dan kegiatan serta memuatnya ke dalam Dokumen Rencana Kerja (Renja) tahun 2022 secara simple, terukur, dapat dilaksanakan dan dicapai serta terarah.
  4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renja tahun 2022 maka perlu dilaksanakan evaluasi setiap tiga bulan atau semesteran untuk mengetahui kemajuan pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan program dan kegiatan berpedoman pada RKPD Tahun 2022 sesuai visi dan misi Kepala Daerah yang terpilih dan Renstra Dinas Pertanian tahun 2018-2023.

#### **4.3. Rencana Tindak Lanjut**

- Kegiatan yang memerlukan penanganan lebih lanjut adalah Pembangunan Agropolitan Tuter berupa pembangunan rest area yang berlokasi di Kebun Dinas Tuter dengan anggaran yang ada di Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran serta rencana pembangunan Arjuno Technopark di Desa Sumberrejo Kecamatan Purwosari yang pelaksanaannya secara bertahap dengan dimulai pada tahun 2021 melalui Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) sebesar Rp.49.980.000 untuk penanaman komoditas hortikultura terdiri dari bibit durian (Kasmin, Sitempur) dan bibit alpukat yang akan ditanam pada luas areal  $\pm 1$  Ha. Kemudian pada tahun 2022 telah dianggarkan sebesar Rp. 200.000.000 untuk penanaman komoditas perkebunan yang terdiri dari bibit Lamtoro, cengkeh dan kelapa genjah serta penanaman bibit komoditas hortikultura terdiri



dari bibit jeruk (Batu 55), mangga (Garifta, Klonal 21) yang akan ditanam pada luas areal ±2 Ha

Renja Dinas Pertanian ini merupakan perencanaan yang akan menjadi acuan penyusunan dokumen perencanaan tahunan tahap selanjutnya dan sebagai dasar penyusunan dokumen penganggaran Tahun 2022.

Pasuruan, 2 Agustus 2021

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M.IRSYAD YUSUF